

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN  
DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

IQBAL AZHAR

NPP 30.0191

*Asdaf Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: iqbalazhar2205@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** Forms of implementation of the enactment of the principle of fiscal decentralization in the context of implementing regional autonomy through regional financial management. Regional autonomy gives things to the regions in the form of granting a budget as a form of balancing the financial relationship between the center and the regions. This is intended to finance all government affairs activities that are delegated to regional governments to carry out regional affairs. Until now, Padang Pariaman still requires large balancing funds for regional expenditure activities, therefore it is necessary to measure the level of regional financial performance in Padang Pariaman Regency. **Purpose:** This research is intended to measure the level of regional financial performance in Padang Pariaman Regency and to find out the inhibiting factors and efforts to overcome them. **Method:** This research uses a qualitative research approach with a descriptive method through an inductive thinking framework. The data used in this study is data on the 2017-2021 Padang Pariaman Regency Budget Realization Report. Data analysis used the method of data reduction analysis, data presentation, data description which was carried out through financial ratio analysis through Mahmudi's theory. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the Regional Financial Performance of Padang Pariaman Regency is still considered low based on indicators of the ratio of the degree of decentralization, the ratio of independence, the ratio of efficiency, and the ratio of growth while the ratio of effectiveness is quite effective and the ratio of regional dependence is high. The factor that hinders financial performance is the lack of employee competence due to the large number of employees who have non-linear educational backgrounds and inadequate facilities. While the efforts made are to provide training to employees and improve employee performance support facilities. **Conclusion:** From the results obtained, it can be concluded that the regional government of Padang Pariaman Regency needs to evaluate financial performance, which in this case maximizes collection of local revenue through increasing tax collection, increasing transparency and implementation of service functions, development and empowerment, as well as increasing and empowering BUMNag sector through the provision of facilities and expertise.

**Keywords:** Ratio Analysis, Local Government Financial Performance

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Bentuk implementasi atas pemberlakuan asas desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hal kepada daerah berupa pemberian anggaran sebagai bentuk perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membiayai seluruh aktivitas urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah. Padang Pariaman hingga saat ini masih memerlukan dana perimbangan yang besar terhadap kegiatan belanja daerah, maka dari itu perlu diukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif melalui kerangka Berfikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data yang dilakukan melalui analisis rasio keuangan melalui teori Mahmudi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dinilai masih rendah berdasarkan indikator rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan sedangkan pada indikator rasio efektivitas sudah cukup efektif serta rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam kinerja keuangan adalah kurangnya kompetensi pegawai akibat banyaknya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dan sarana yang belum memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai dan meningkatkan sarana penunjang kinerja pegawai. **Kesimpulan:** Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dalam hal ini memaksimalkan pemungutan pendapatan asli daerah melalui peningkatan pemungutan pajak, meningkatkan transparansi dan pelaksanaan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, serta meningkatkan dan memberdayakan sektor BUMNag melalui pemberian fasilitas dan keahlian.

**Kata Kunci :** Analisis Rasio, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penerapan sistem otonomi daerah mulai diberlakukan pada tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam kewajiban untuk mengatur dan mengelola segala urusan yang berkaitan dengan daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Timbulnya asas otonomi menjadikan fungsi pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem desentralisasi fiskal dapat membantu pemerintah daerah secara universal dalam mengelola, menata dan memanfaatkan potensi sumber penerimaan yang dimiliki.

Salah satu komponen yang dilakukan dalam menjalankan suatu program kerja pemerintahan adalah dengan adanya anggaran daerah. Anggaran di suatu daerah disusun berdasarkan Anggaran pendapatan Belanja Daerah yang telah dibahas dan di setujui oleh badan legislatif di mana dalam proses pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah dengan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dimuat dalam bentuk kuantitatif yang berisi penjabaran dari sasaran dan tujuan atas pencapaian



pemerintah daerah yang disusun secara terstruktur dalam mencapai tujuan dalam satu periode tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan mengenai pendapatan daerah yang merupakan segala indikator kekayaan murni daerah yang dinilai sebagai penambah penghasilan daerah yang dimana hak dan kepemilikannya telah diakui oleh negara. Pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 pada pasal 30 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan keuangan dapat dijalankan menggunakan prinsip *value for money* dengan menggunakan asas transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan sehingga pengelolaan keuangan berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam hal ini tentunya perlu melakukan evaluasi penilaian terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sehingga dapat dijadikan acuan sebagai referensi dalam melakukan revisi pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya. Berdasarkan keadaan keuangan Pemerintah Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman cenderung bergantung kepada pemerintah pusat dalam pemasukan pembiayaan. Hal ini tentunya dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian daerah sehingga perlu dianalisis untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan terkait dengan kinerja keuangan daerah yaitu dalam perolehan dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan hasil kecenderungan yang diperoleh dari Dana Perimbangan Pusat. Hal ini dikarenakan tingkat pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten yang dinilai masih rendah dan belum mencapai target sehingga perlu suntikan dana yang besar kepada Pemerintah Pusat untuk menjalankan roda pemerintahannya.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya memberikan gambaran singkat tentang hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya pada topik yang hampir sama dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

Nenda Marliani (2020), memberikan gambaran analisis kinerja keuangan dengan menggunakan variabel rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio pendapatan asli daerah, rasio efektivitas belanja. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada pola hubungan konsultatif.

Sandy Candra Putra, Wayan Suwendra, Fridayana Yudiatmaja (2018), memberikan gambaran berbeda mengenai rasio yang dijadikan sub rasio kinerja keuangan diantaranya analisis varians pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, analisis varians belanja, analisis efisiensi belanja dan analisis rasio belanja modal dan belanja operasional. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi dan rasio kemandirian masih belum memadai sehingga tergolong dalam kategori sangat kurang dan perlu banyak dana perimbangan terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dalam setiap tahunnya.

Maisyuri (2017), tulisan ini memberikan gambaran pengukuran kinerja keuangan daerah hanya berdasarkan empat jenis rasio saja diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Berdasarkan

perolehan hasil perhitungan rasio maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah lhokseumawe belum efektif dan efisien sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

Surastowo (2019) Tulisan ini memberikan gambaran pengukuran kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah lampung timur dalam menjalankan desentralisasinya berjalan dengan baik walaupun rasio kemandirian daerah masih tergolong rendah. Dalam hal ini, pemerintah kota lampung terus menambah belanja modal guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Arhaldi, Irdha Yusra (2019) Tulisan ini memberikan gambaran pengukuran kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio diatas dapat disimpulkan bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada berdasarkan kriteria kemandirian Pemerintah Kota Padang berada pada kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana ntuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah meliputi pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan pada jenis penelitian di mana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sementara peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu, indikator yang digunakan yakni teori analisis menurut Mahmudi dalam analisis kinerja keuangan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan indikator analisis rasio kinerja keuangan diantaranya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Ketergantungan dan Rasio Pertumbuhan. Selanjutnya mengetahui faktor yang menyebabkan terhambatnya proses kinerja keuangan dan upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

### **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif melalui kerangka Berfikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa Wawancara Semiterstruktur. Adapun analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data yang dilakukan melalui analisis rasio keuangan melalui teori Mahmudi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan analisis kinerja berdasarkan pengukuran rasio dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan dan rasio pertumbuhan. Berikut ini perkembembangan lebih objektif dalam dilihat pada subbab pembahasan sebagai berikut:



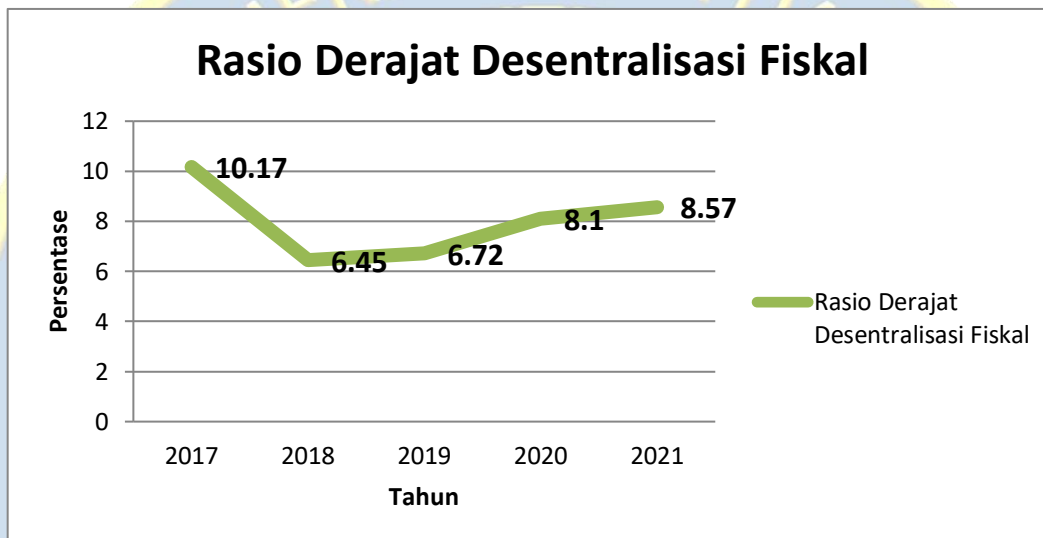
### 3.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai segala penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah.

Pengukuran rasio derajat desentralisasi diukur dengan variabel sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2017-2021 peneliti menggunakan rumusan tersebut untuk mendapatkan hasil rasio derajat desentralisasi fiskal. Adapun hasil rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:



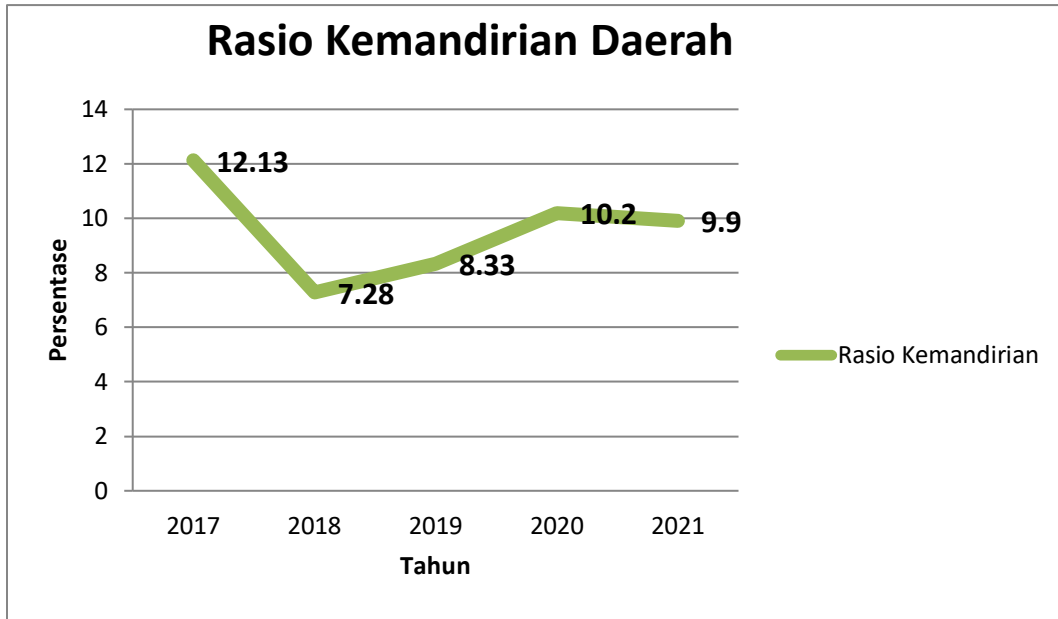
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase nilai rata-rata rasio desentralisasi fiskal selama masa periode 2017-2021 mengalami penurunan pada tahun 2018 dari 10,17% menjadi 6,45% yang kemudian pada tahun periode berikutnya terjadi peningkatan nilai rasio secara bertahap mulai dari 6,72%, 8,10%, 8,57%. Dalam meningkatkan rasio desentralisasi menuju ke arah yang lebih tinggi diperlukan peran pemerintah dalam melakukan optimalisasi peningkatan pemungutan pendapatan asli daerah.

### 3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan sebagai indikator dalam meninjau kemampuan daerah dalam menanggung seluruh bentuk kegiatan agenda pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Adapun rasio kemandirian daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah dan total bantuan pemerintah secara eksternal kabupaten padang pariaman menjadi indikator penting yang diperlukan dalam merumuskan perhitungan hasil rasio kemandirian. Adapun dalam hal ini terdapat perolehan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:



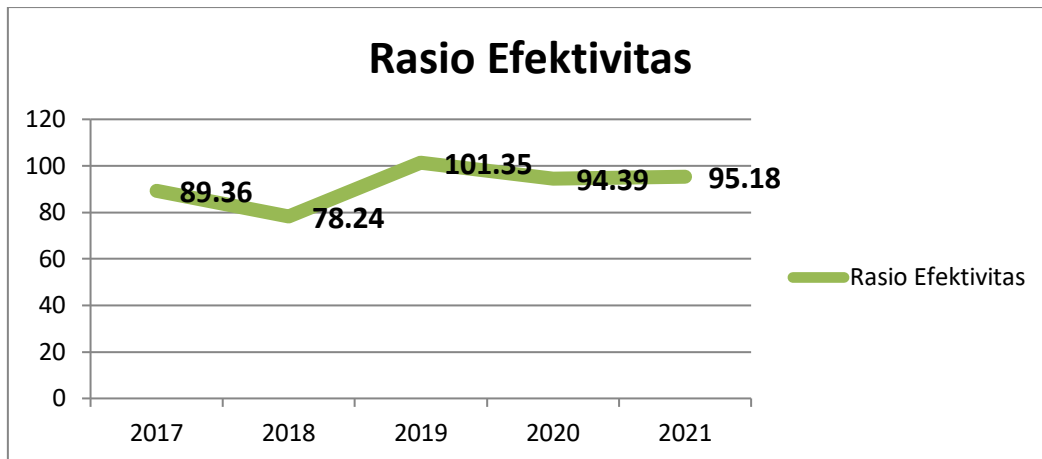
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase angka kemandirian daerah pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap rasio kemandirian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh angka perolehan pendapatan asli daerah yang sedikit dengan dari tahun sebelumnya sehingga diperlukan suntikan dana dari pemerintah pusat melalui pendapatan transfer yang lebih besar yang digunakan untuk menutupi kebutuhan pemerintah daerah.

### 3.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kinerja suatu pemerintah dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang diteloh ditetapkan secara riil sehingga dapat di katakan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin efektif kinerja keuangan tersebut begitupun sebaliknya. indikator yang diperlukan dalam menentukan tingkat efektivitas adalah target dan realisasi pendapatan asli daerah sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:



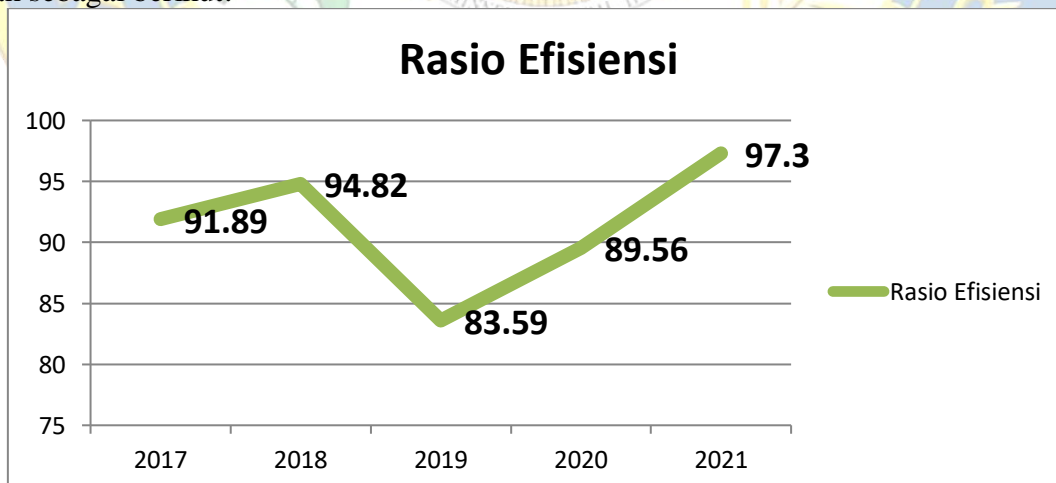
Berdasarkan grafik diatas, rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2017-2021 mengalami perkembangan secara fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan perolehan target pendapatan asli daerah yang telah direncanakan pemerintah daerah sebelumnya.

### 3.4 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan dalam memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan untuk belanja daerah berdasarkan total realisasi pendapatan daerah dalam satu periode anggaran. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan tingkat besaran pengeluaran dari pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam membiayai seluruh kegiatan belanja daerah. Semakin besar persentase yang dihasilkan artinya semakin rendah tingkat efisiensi yang diperoleh begitupun sebaliknya. Adapun rumusan yang digunakan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Adapun hasil grafik berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yang tinggi pada tahun 2018-2019 yaitu dari 94,92% menjadi 83,59%. Hal ini dikarenakan kurangnya belanja daerah yang di optimalkan terhadap pendapatan daerah yang diterima oleh daerah. Kemudian pada, tahun berikutnya terjadi peningkatan rasio efisiensi keuangan akibat pemanfaatan pendayagunaan pendapatan daerah yang dioptimalkan melalui belanja daerah sehingga dapat



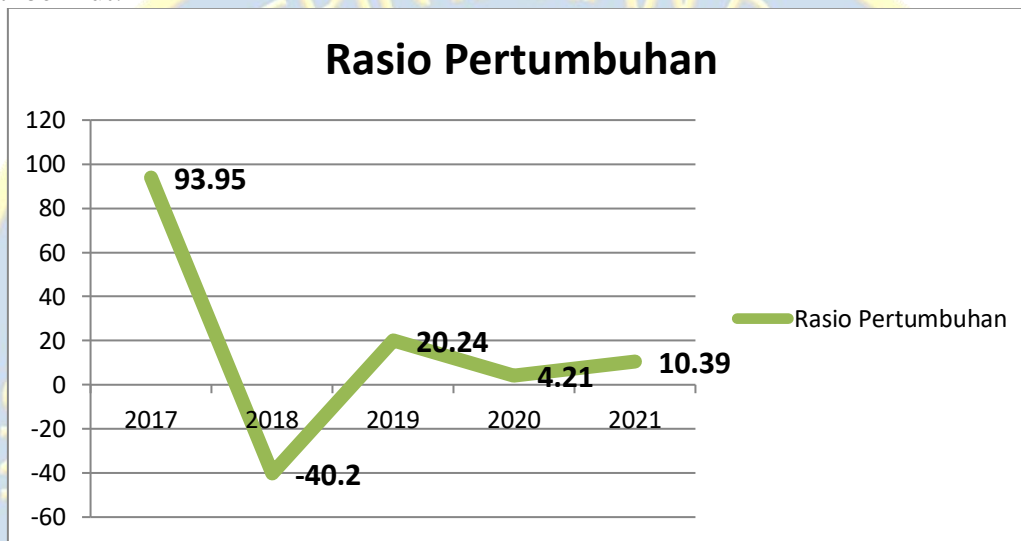
disimpulkan bahwa belanja daerah harus dioptimalkan secara maksimal terhadap pendapatan daerah.

### 3.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan pada satu periode tertentu. Untuk mengukur hasil rasio pertumbuhan dapat diperoleh melalui rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan } X_n - X_{(n-1)}}{\text{Realisasi Penerimaan } X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio pertumbuhan dalam tahun 2017-2021 yang kemudian dibuat dalam grafik sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan angka pertumbuhan keuangan yang menurun drastis. Hal ini dikarenakan adanya penurunan perolehan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan dan penurunan yang stabil.

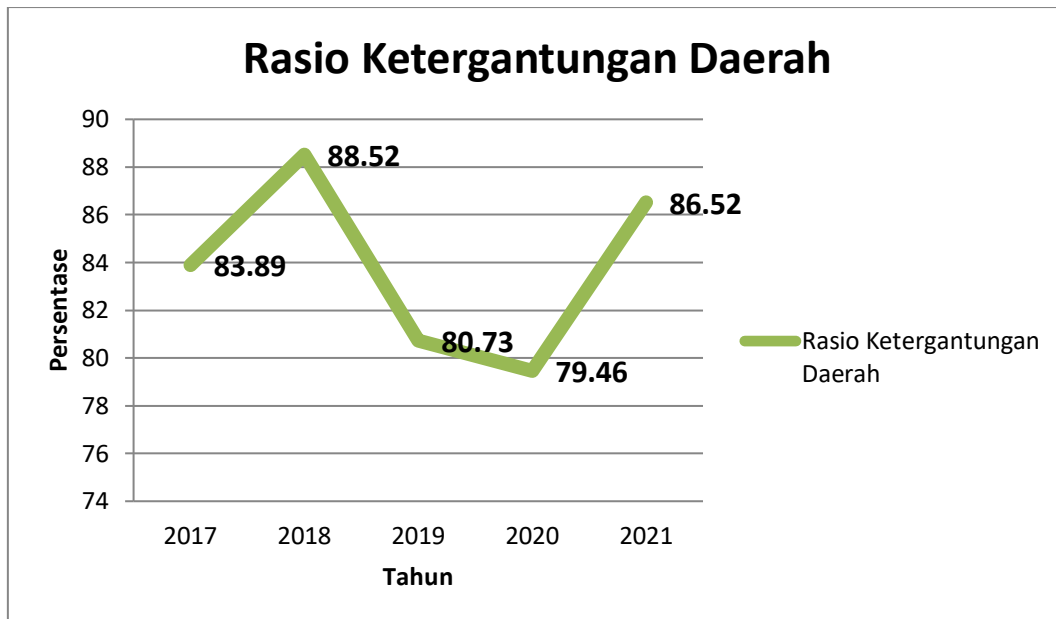
### 3.6 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan tingkat ketergantungan suatu daerah. Pada hakikatnya, rasio ketergantungan sama seperti rasio kemandirian keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintahan. Akan tetapi, rasio ketergantungan lebih menekankan pada aspek tingkat ketergantungan suatu daerah oleh pendapatan eksternal dalam mengakomodasi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbedaan antara rasio ketergantungan dan rasio kemandirian dapat ditinjau dari indikator yang digunakan dalam menghitung rasio. Rasio ketergantungan menggunakan indikator pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi dan akumulasi pendapatan daerah. Rasio ketergantungan dapat diperoleh dengan membandingkan dua variabel yaitu pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Maka dari itu, rasio ketergantungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dibuat dalam grafik sebagai berikut:





Pada grafik tersebut, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang cenderung naik turun pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena keterbutuhannya pemerintah daerah terhadap dana pemerintah pusat guna menutupi anggaran belanja daerah yang telah di anggarkan. Akan tetapi, pendapatan asli daerah yang cenderung masih belum bisa menutupi secara maksimal sehingga permintaan dana kepada pemerintah pusat menjadi besar. Akibatnya, tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan rasio ketergantungan daerah tergolong tinggi.

### 3.7 Faktor Penghambat dalam Kinerja Keuangan Daerah

#### 1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pariaman masih dalam kategori kurang efisien. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola sistem seperti operator yang mampu mengoperasikan sistem informasi keuangan dengan baik di dalam pengelolaan anggaran.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman, Mengatakan bahwa:

“Tingginya angka ketergantungan daerah terhadap keuangan pemerintah pusat pada Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan oleh rendahnya tingkat kinerja daerah yang disebabkan sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang bekerja pada umumnya bukan berasal dari latar belakang keuangan. Salah satu bentuk dari kurangnya kompetensi pegawai adalah adanya kebocoran terhadap jumlah pendapatan terhadap pelaporan pada pemungutan pajak sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terjadi kebocoran pelaporan pendapatan kepada pihak terkait terutama pada pajak restoran yang tidak transparan yang mengedepankan pembayaran pajak dengan biaya sekecil mungkin. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan daerah, maka dari itu perlunya rasa kesadaran masyarakat akan wajib membayar pajak.”

Dari hasil wawancara dan penghitungan yang dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan pada kompetensi pegawai pemerintah pegawai akibat dari banyaknya pegawai yang bekerja tidak linear dengan latar belakang kompetensi bidang ahlinya.

## 2. Efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil peninjauan perhitungan berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa masih kurang efisien dan cukup efisien, serta rasio kemandirian daerah yang tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan mengenai indikator rasio efektivitas dan efisiensi yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada interval kategori yang dinilai kurang. Hal ini diakibatkan adanya kekurangan dalam kinerja keuangan daerah yang belum dapat menggali potensi kekayaan daerah secara maksimal serta terdapat kelalaian pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian yang ditinjau oleh peneliti selama lima tahun terakhir adalah realisasi penerimaan PAD Kabupaten Padang Pariaman hanya pada tahun 2019 yang mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadikan tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, Realisasi belanja daerah juga dinilai belum memenuhi target sehingga setiap tahunnya terdapat sisa anggaran berlebih yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai hal lain yang dapat menunjang kemajuan ekonomi daerah.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berpendapat mengenai fenomena ini sebagai berikut:

“Penerimaan pemasukan asli daerah yang dinilai masih kurang serta realisasi belanja yang belum memenuhi target dan memiliki selisih yang tidak jauh. Pada umumnya, ketidakpenuhan target penerimaan dan belanja daerah merupakan hal yang lumrah terjadi di seluruh pemerintah daerah, akan tetapi hal ini tidak boleh dianggap sepele, pemerintah perlu meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan perhitungan pada indikator pengukur rasio keuangan dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakmatangan dalam melakukan proses perencanaan sehingga tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, munculnya wabah pandemi *COVID-19* yang menjadikan perekonomian mengalami kemunduran hingga mengalami kelumpuhan sementara yang mengakibatkan turunnya pendapatan dan besarnya pengeluaran sehingga pemerintah perlu melakukan regulasi terhadap perencanaan keuangan.

### 3.8 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Kinerja Keuangan

#### 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini menjalankan otonomi daerah dengan kondisi keuangan yang diakomodasi oleh daerah sendiri dengan mengelola, menggali, dan memaksimalkan sumber pendapatan daerah dengan meminimalisir penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan dana yang diperoleh dari daerah.

Pemerintah melalui program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Proses peningkatan kinerja keuangan terhadap pegawai diperlukan beberapa program penunjang pegawai. Dalam meningkatkan upaya dalam mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah Melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian bimbingan dan pelatihan kepada aparatur guna memberikan kompetensi lebih kepada para pegawai sehingga kinerja pemungutan pajak dapat berjalan dengan optimal.”

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini terus melakukan terobosan untuk memfasilitasi serta mendukung setiap pegawai BPKD dalam mengikuti pelatihan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah serta memberikan peluang kepada pegawai yang ingin melanjutkan studi ke jenjang berikutnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat menjadi pegawai yang lebih profesional dalam bertugas sehingga dapat memberikan



kontribusi yang lebih baik dari sebelumnya menuju keuangan Padang Pariaman yang lebih baik.

## 2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas publik melalui pemberian fasilitas pendukung kepada pemungut pajak dalam hal teknologi dan informasi sehingga proses pemungutan dapat berjalan secara optimal dan efisien. Adapun strategi dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai Berikut:

- a. Melakukan pemuktahiran data wajib pajak dan izin usaha yang telah diberikan;
- b. melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan maupun tempat yang menggunakan perizinan usaha;
- c. penetapan ulang besaran yang harus dibayar oleh wajib pajak maupun retribusi;
- d. pendataan wajib pajak maupun retribusi daerah yang baru;
- e. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan taat membayar pajak

Beberapa strategi dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan terus dapat memberikan solusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah dan menjadikan Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah yang mandiri dan memiliki angka tingkat ketergantungan rendah terhadap pemerintah pusat.

### 3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja keuangan daerah menjelaskan tentang bagaimana kemampuan sebuah daerah dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Terdapat tiga sumber pendapatan daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pemerintah daerah dalam hal ini sangat menekankan pada kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman yang masih jauh di atas belanja daerah sehingga perlu dana perimbangan yang banyak dalam menjalankan roda pemerintahannya dalam satu periode.

Pendapatan Asli Daerah yang rendah dapat menimbulkan angka ketergantungan daerah yang tinggi dan akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini berakibat pada tingkat kinerja keuangan daerah yang menyebabkan kurangnya target yang diperoleh dengan anggaran yang diperlukan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman masih tergolong rendah. Maka dari itu diperlukan strategi peningkatan pemungutan dan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat menjadikan suatu daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan tidak bergantung kepada dana perimbangan.

## 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan 5 (lima) tahun tersebut dapat disimpulkan masih masuk dalam kategori kurang dan perlu banyak peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada perolehan hasil rasio yang cenderung rendah akibat minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap belanja daerah di mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan suntikan dana perimbangan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah a) efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah masih

- belum maksimal pada beberapa tahun anggaran yang disebabkan oleh belum sesuainya realisasi anggaran terhadap target; b) Derajat desentralisasi yang masih tinggi yang diakibatkan oleh Rendahnya penapatan asli daerah; c) Ketergantungan Daerah yang sangat tinggi terhadap bantuan dana transfer pusat yang diakibatkan oleh banyaknya *Mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan Adanya politik anggaran nasional yang menyebabkan berkurangnya potensi daerah
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan bimbingan dan pelatihan pegawai sehingga dapat meningkatkan indeks Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pendapatan Asli Daerah dalam pemungutan pendapatan melalui pemberian fasilitas pendukung berbasis teknologi dan informasi kepada para pegawai yang bertujuan untuk memudahkan melakukan proses monitoring dan pendataan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni Rentan waktu yang digunakan hanya lima tahun sehingga terkesan kurang maksimal dalam melakukan penelitian dan Sampel yang digunakan terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja keuangan Kabupaten Padang Pariaman.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian dan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Farida, Ai Siti dkk. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol 11 No. 2, 107-124.
- Harahap, Heri Faisal. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4 No. 1, 34-38.
- Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Marliani, Nenda. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, Volume 14 Nomor 1, 11-20.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Maisyuri. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe*. Jurnal Visioner & Strategis Vol. 6, 53-65
- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2017.
- Saputra, Sandy Candra, dkk. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*. Jurnal Manajemen, Vol 4 No. 2 Hal 136-145
- Surastowo. 2019. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014-2018*. Jurnal Manajemen, Vol.2 No.3, 175-185
- Yusra Irdha, Arhaldi. 2019. *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2014-2018*. Jurnal Pundi, Vol.03 No.83-100